

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU.

- G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga. Jakarta.
- Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenanda Media, Jakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung,.
- 2009, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya, Bandung.
- , 2020, *Problematika dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum, Deskriptif dan Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Alih Bahasa oleh Somardi.
- Harlien Budiono, 2006, *Asas-asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wiganti Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Indroharto, 1996, *Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I*, Pustaka Sinar Harapan.
- Komar Andasmita, 1991, *Ikatan Notaris Indonesia*, Jawa Barat.

- Liliana Tejosaputra, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta : Suatu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.m
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo dan Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 1999, *Mengenai Hukum Sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soesanto, R.,1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2002, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta.
- Zulkifli Amsyah, 2005, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

## **B. JURNAL, ARTIKEL KAMUS DAN MEDIA DARING.**

- Gusti Agung Oka Diatmika, “*Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Autentik*” (2017), 1:150-160, *Jurnal Acta Comitas*.
- <https://kbbi.web.id/Notaris>, diakses pada tanggal 30 Juni 2022.
- Laurensius Arliman S, “*Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya*”, 2018, 9:2 *Jurnal Dialogia luridica*.
- Leny Agustian, 2021, *Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat dan/atau Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dibidang Pertanahan*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Padlin, 2020, *Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Dimana Minuta Akta Hilang di Kota Padang*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang.

Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, *Makalah Bulanan Yuridika Nomor 5-6 Tahun XII September*, Surabaya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , Balai Pustaka, Jakarta.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tatacara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tatakerja Majelis Pengawas Notaris,

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tatacara Pengangkatan, Perpindahan, Perberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Perberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.